



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIK HARIYONO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 179017

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.250.440.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/86 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.440.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	9.000.000
1. MOTOR, HONDA A1F02N36MA A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.040.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	338.000.003
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.637.440.003
III. HUTANG	Rp.	637.951.431
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.999.488.572

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARMAJI
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI
3. NHK : 120986

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.480.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/123 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m2/21 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/179 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m2/21 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
8. Tanah Seluas 85 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/154 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
10. Tanah Seluas 2 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 210.000.000
11. Tanah Seluas 1 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 110.000.000



12. Tanah Seluas 269 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 60.000.000
13. Tanah Seluas 3 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 252.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS GR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 136.990.490

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.868.990.490

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.868.990.490

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUNG BUDI SETIJADJI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
3. NHK : 143204

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/100 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	269.500.000
1. MOTOR, YAMAHA JUPITER SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA R15 SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000		
3. MOTOR, YAMAHA AEROX SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
4. MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
5. MOTOR, YAMAHA XMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000		
6. MOTOR, YAMAHA AEROX BBP A AT/SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	90.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	290.328.640
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.899.828.640



III. HUTANG

Rp. 82.430.389

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.817.398.251

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS SUGIARTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN
3. NHK : 114892

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	950.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/175 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	359.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA K.INNNOVA 2.46 MT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	43.970.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	65.692.531
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.418.662.531
III. HUTANG	Rp.	258.337.775
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.160.324.756

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRWAN MARDIANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI
3. NHK : 135144

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.410.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 273 m2/190 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/70 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 118.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 23.015.002

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.551.015.002

III. HUTANG Rp. 158.642.839

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.392.372.163

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI SOEGIRI**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGI**
3. NHK : **172312**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	900.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	98.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	124.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	220.341.778
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.342.341.778
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.342.341.778

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERU RIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI**
3. NHK : **195570**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.791.360.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 3.712 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 111.360.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 158.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO MPV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 58.747.500**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	238.990.920
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.247.598.420
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.247.598.420

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MURTAJI
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH MADYA
3. NHK : 767101

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	732.000.000
1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/54 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 437.000.000		
3. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/50 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	135.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G 2.0 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	33.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	705.574.519
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.605.574.519
III. HUTANG	Rp.	90.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.515.574.519

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.